

# NEGARA HUKUM INDONESIA

Dialektika Konstitusi, Kekuasaan dan Demokrasi

Ade Ari Gumilar, Bustanul Arifin, Firdaus Ayu Palestina,  
Ziyad Abdul Ghani, Ahmad Khotim, Moh Bagus,  
Mahfudz Junaedi, Novi Rahmansyah, Alwi Patoni, Moh.  
Alfin Sulikhodin, Mohamad Nur Husen, Senki  
Nurachmadi, Fathur Rozi



Editor : Dr. Nur Kholis, M.H.I

**NEGARA HUKUM INDONESIA :  
Dialektika Konstitusi, Kekuasaan, dan Demokrasi**

Ade Ari Gumilar, Bustanul Arifin, Firdaus Ayu  
Palestina, Ziyad Abdul Ghani, Ahmad Khotim, Moh  
Bagus, Mahfudz Junaedi, Novi Rahmansyah, Alwi  
Patoni, Moh. Alfin Sulihkhodin, Mohamad Nur Husen,  
Senki Nurachmadi, Fathur Rozi



**NEGARA HUKUM INDONESIA :**  
**Dialektika Konstitusi, Kekuasaan, dan Demokrasi**

---

Penulis : Ade Ari Gumilar, Bustanul Arifin, Firdaus Ayu  
Palestina, Ziyad Abdul Ghani, Ahmad Khotim,  
Moh Bagus, Mahfudz Junaedi, Novi Rahmansyah,  
Alwi Patoni, Moh. Alfin Sulihkhodin, Mohamad  
Nur Husen, Senki Nurachmadi, Fathur Rozi

Editor : Dr. Nur Kholis, M.H.I

proofreader : DSI Press

Setting & layout : DSI Press

desain cover : DSI Press

link : [www.dutasains.com](http://www.dutasains.com)

ISBN : 978-634-7443-82-3

Hak Penerbitan ada pada © Duta Sains Indonesia 2026

Ukuran Unesco

Halaman : vii + 131 Hal

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari  
Duta Sains Indonesia

Cetakan I, April 2026



Sedati Agung 3 RT 07 RW 01 Kec. Sedati  
Jawa Timur – Indonesia  
Telp. 0877 5551 0658  
E-mail : [dutasainsindonesia@gmail.com](mailto:dutasainsindonesia@gmail.com)  
Website: [www.dutasains.com](http://www.dutasains.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku bunga rampai yang berjudul *Negara Hukum Indonesia: Dialektika Konstitusi, Kekuasaan, dan Demokrasi* ini dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan hasil dari refleksi akademik serta kontribusi pemikiran dari berbagai penulis yang memiliki perhatian terhadap dinamika perkembangan negara hukum di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum tata negara sekaligus menjadi bahan refleksi dalam memahami hubungan antara konstitusi, kekuasaan, dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep negara hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Prinsip tersebut tercermin secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai dasar bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah maupun lembaga negara harus tunduk pada hukum dan konstitusi yang berlaku.

Namun demikian, perjalanan negara hukum di Indonesia tidaklah berlangsung secara linier. Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam hubungan antara konstitusi, kekuasaan, dan demokrasi. Pada berbagai periode sejarah, praktik penyelenggaraan negara sering kali diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan antara kekuasaan politik dan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam konteks inilah konsep dialektika menjadi relevan untuk memahami perkembangan negara hukum di Indonesia, yakni sebagai proses interaksi yang dinamis antara berbagai gagasan, nilai, dan praktik dalam kehidupan bernegara.

Konstitusi sebagai hukum dasar negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum yang mengatur struktur dan mekanisme pemerintahan, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Konstitusi memuat berbagai prinsip penting seperti pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan terhadap pelaksanaan

demokrasi. Oleh karena itu, konstitusi harus dijadikan sebagai rujukan utama dalam setiap praktik penyelenggaraan negara.

Di sisi lain, kekuasaan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan negara. Dalam praktiknya, kekuasaan memiliki potensi untuk berkembang secara dominan apabila tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan dan pembatasan yang efektif. Oleh karena itu, dalam negara hukum, kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi serta diawasi melalui berbagai mekanisme kelembagaan yang tersedia. Prinsip pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan tersebut.

Demokrasi juga menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Melalui mekanisme demokrasi, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara konstitusi, kekuasaan, dan demokrasi sering kali menunjukkan dinamika yang menarik. Reformasi konstitusi yang dilakukan setelah tahun 1998 merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Perubahan tersebut membawa berbagai implikasi penting, antara lain penguatan lembaga-lembaga negara, peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta berkembangnya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara.

Buku bunga rampai ini berupaya untuk mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan negara hukum di Indonesia. Berbagai tulisan yang terkumpul dalam buku ini membahas isu-isu penting seperti supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, peran lembaga peradilan, partisipasi publik dalam demokrasi, serta dinamika hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Melalui pendekatan yang beragam, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan negara hukum di Indonesia.

Sebagai sebuah bunga rampai, buku ini menyajikan berbagai perspektif yang berasal dari latar belakang keilmuan dan pengalaman

akademik yang berbeda. Keragaman perspektif tersebut justru menjadi kekuatan tersendiri karena dapat memperkaya diskursus mengenai negara hukum di Indonesia. Setiap tulisan dalam buku ini memberikan kontribusi pemikiran yang penting dalam memahami berbagai persoalan konstitusional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi salah satu referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum tata negara dan demokrasi di Indonesia. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku bunga rampai ini. Tanpa dedikasi dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, buku ini tidak mungkin dapat terwujud. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

Editor

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN BALIK JUDUL .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB 1	
KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK	
Ade Ari Gumilar .....	1
BAB 2	
SEJARAH PERKEMBANGAN NEGARA HUKUM DI INDONESIA	
Bustanul Arifin .....	16
BAB 3	
PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS NEGARA HUKUM INDONESIA	
Firdaus Ayu Palestina.....	29
BAB 4	
KONSTITUSI SEBAGAI PILAR NEGARA HUKUM	
Ziyad Abdul Ghani .....	39
BAB 5	
PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	
Ahmad Khotim.....	46
BAB 6	
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA	
Moh. Bagus .....	56
BAB 7	
PEMILIHAN UMUM SEBAGAI INSTRUMEN DEMOKRASI	
Mahfudz Junaedi.....	67

BAB 8	
HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA	
Novi Rahmansyah.....	80
BAB 9	
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM NEGARA HUKUM	
Alwi Patoni .....	88
BAB 10	
PERADILAN YANG MERDEKA DAN BERKEADILAN	
Moh. Alfin Sulihkhodin.....	98
BAB 11	
TANTANGAN NEGARA HUKUM DI ERA DEMOKRASI DIGITAL	
Mohamad Nur Husen.....	109
BAB 12	
OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM	
Senki Nurachmadi.....	116
BAB 13	
PARTISIPASI PUBLIK DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS	
Fathur Rozi .....	125